

## BAB IV

### KERJASAMA KEDUBES JEPANG DAN KARYA MUDA BELITUNG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN GGP

Metode industri yang masih bersifat tradisional yang menghasilkan ketidaksatbilan pendapatan pada masyarakat pesisir yang memiliki industri ikan asin dan olahan kering lainnya di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Oleh sebab itu, perkumpulan Karya Muda Belitung (KMB) berinisiatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan bantuan asing yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang melalui program “Grant Assistance for Grassroots Human Security Project” (GGP). Program ini merupakan salah satu jenis bantuan dari Official Development Assistance (ODA) yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang.

Skema *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP) diimplementasikan kedalam dua bentuk kerjasama. *Pertama*, Kedubes Jepang memberikan dana hibah kepada Karya Muda Belitung untuk pengadaan asset material berupa mesin pengering ikan (food drying machine) yang berkapasitas besar kepada masyarakat pesisir agar mempunyai alternatif lain dalam memproduksi ikan asin dan produk olahan lainnya, serta tidak ketergantungan dengan kondisi cuaca yang bisa mempengaruhi proses produksi. *Kedua*, skema GGP yang ditawarkan oleh Kedubes Jepang mengharuskan Karya Muda Belitung untuk membuat program pemberdayaan bagi masyarakat pesisir berupa kelas aplikatif di lingkungan produksi agar bantuan yang diberikan bisa berjalan efektif, berkelanjutan serta memberikan edukasi kepada mereka dalam merancang, mengerjakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan yang sudah diberikan.

### A. Profil Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung

Kabupaten Belitung merupakan salah satu wilayah administratif dari Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung yang terletak di Pulau Belitung. Secara geografis Kabupaten ini berbatasan dengan selat karimata dibagian timur, Laut Jawa bagian selatan, Selat Bangka di bagian Barat dan Laut Natuna di bagian Utara. Kabupaten Belitung terdiri dari 100 buah pulau kecil dan besar dengan pulau terbesar yaitu Pulau Belitung yang pusat pemerintahannya juga berada di Pulau tersebut (BPS Kabupaten Belitung, 2018).

Luas wilayah daratan di Kabupaten Belitung sebesar 2.293,69 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk 182.418 jiwa. Sebagai daerah kepulauan yang kaya akan sumber daya maritimnya, maka sekitar 4.472 kepala keluarga dari total penduduk di Kabupaten Belitung memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Administrasi di Kabupaten Belitung dibagi menjadi lima kecamatan, yaitu Membalong, Badau, Tanjung Pandan, Selat Nasik dan Sijuk (BPS Kabupaten Belitung, 2018). Namun kecamatan yang menjadi sasaran dalam proyek bantuan hibah akar rumput dari pemerintah Jepang untuk tahun fiskal 2017 adalah Kecamatan Sijuk.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Belitung



(Sumber: <http://portal.belitungkab.go.id/kondisi-geografis>)

Kecamatan Sijuk merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Belitung dengan keadaan geografis terletak di sebelah barat laut pulau Belitung dan memiliki batas-batas berikut: wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur, wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Pandan, wilayah barat berbatasan dengan selat Gaspar dan wilayah utara berbatasan dengan Laut Natuna. Luas wilayah Kecamatan Sijuk sebesar 452.000 ha atau kurang lebih setara dengan 452,00 km<sup>2</sup> dan memiliki 17 buah pulau besar dan kecil. Jumlah penduduk di Kecamatan Sijuk berjumlah 30.646 jiwa dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Secara administratif Kecamatan Sijuk terdiri dari 10 desa (Batu Itam, Terong, Air Seruk, Air Selumar, Tanjung Binga, Keciput, Sungai Padang, Tanjong Tinggi dan Pelepek Pute) dan pusat pemerintahannya terletak di Desa Sijuk (BPS Kabupaten Belitung, 2018).

### **B. Potensi dan masalah olahan perikanan di Kecamatan Sijuk**

Hasil perikanan di Kecamatan Sijuk sangat melimpah sehingga masyarakat pesisir di daerah ini memiliki berbagai macam olahan perikanan yang begitu beragam seperti ikan asin dan produk olahan lainnya, bahkan daerah ini juga memiliki desa yang menjadi salah satu sentra ikan asin terbesar di Indonesia. Berikut merupakan jumlah produksi perikanan perkecamatan yang ada di Kabupaten Belitung pada tahun 2017.

Tabel 4.1 Tingkat Produksi Perikanan Perkecamatan di Kabupaten Belitung pada Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Produksi
Membalong	17 606,42
Tanjung Pandan	12 257,63
Badau	7 094,57
<b>Sijuk</b>	<b>18 219,30</b>
Selat Nasik	13 019,09
Jumlah/Total <u>2017</u>	<u>68 197,01</u>
2016	67 189,18

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dalam (BPS Kabupaten Belitung, 2018)

Data diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Sijuk merupakan daerah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Belitung. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Kecamatan Sijuk sangat dekat dengan laut atau wilayah pesisir dan memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Salah satu kearifan lokal di wilayah pesisir pada umumnya yaitu keluarga nelayan (istri dan anak) akan turut berperan dalam mengolah hasil tangkapan yang dilakukan oleh mereka. Terbatasnya jumlah *Cold Storage* di pelabuhan yang berakibat pada pengolahan hasil tangkapan, terkadang para nelayan harus memperpanjang masa penyimpanan ikan dengan melakukan pengeringan dan pengasinan. Disamping penjualan ikan dalam bentuk segar, pengolahan dengan cara dikeringkan atau diasinkan dapat menambah sumber pemasukan lain yang sangat potensial<sup>1</sup> (KMB, 2017).

Namun lokasi yang terpencil dan akses transportasi cukup sulit mengakibatkan daerah Sijuk kurang tersentuh akan informasi mengenai teknologi (iptek) sehingga pengelolaan perikanan di daerah ini masih dilakukan secara tradisional dan

<sup>1</sup> *Application Form for Japan's Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Indonesian*, Karya Muda Belitung, 2017

kualitas produk yang dihasilkan cenderung tidak seragam. Oleh karena itu, keadaan tersebut berdampak pada nilai jual produk yang rendah dipasaran. Metode pengeringan yang dilakukan masih bersifat tradisional dengan mengandalkan sinar matahari. Metode pengeringan seperti ini meliputi, ikan dibersihkan lalu direbus menggunakan air garam setelah itu langsung dijemur hingga kering (tergantung tingkat ketebalan ikan tersebut) untuk jenis ikan teri dua hari kering namun untuk jenis ikan yang agak tebal bisa hingga empat hari. Sehingga pengolahan pada metode tradisional ini membutuhkan waktu yang lama, terlebih curah hujan di daerah Belitung cukup tinggi (KMB, 2017). Biasanya siklus aktivitas nelayan dalam setiap tahun hanya 8 bulan yaitu mulai dari bulan Maret sampai dengan November sedangkan November sampai dengan Maret mereka istirahat karena arah angin menuju ke timur atau yang dikenal dengan angin muson Timur dimana gelombang di laut cukup besar dan ikan sulit di cari<sup>2</sup> (Terappe, 2019).

Bahkan pada tahun 2017, salah satu desa sasaran di Kecamatan Sujuk yaitu desa Tanjung Binga pernah mengalami kerugian produksi sebesar 1 miliar dalam satu minggu akibat curah hujan yang panjang merusak produksi ikan asin mereka, padahal 80% penduduknya merupakan nelayan yang juga bergantung pada pendapatan produksi ikan asin tersebut. Kronologisnya yaitu ada saat bulan April 2017, ketika para nelayan mulai melaut dan mendapatkan hasil yang sangat melimpah yaitu lebih dari 2 ton untuk satu kapal, curah hujan pada saat itu sangat tinggi dan cahaya matahari begitu sedikit sehingga menjadi kendala bagi masyarakat pesisir untuk mengeringkan produk olahan mereka. Ditambah lagi dengan jumlah lahan penjemuran yang terbatas hanya bisa menampung ikan sebanyak 1 ton dan 1 ton lagi disimpan di dalam *cold storage*. Sedangkan setiap harinya para nelayan mendapatkan hasil tangkapan baru sebanyak 1 ton per kapal sehingga menjadi tertumpuk berhari-hari bila tidak diolah kedalam produk lain

---

<sup>2</sup> Terrape, Kepala Desa Tanjung Binga, *Wawancara*, Kantor Desa Tanjung Binga, 3 Januari 2019

dalam memenuhi permintaan pasar yang variatif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Tanjung Binga bahwa:

“...benar-benar terjadi di bulan April 2017, dikarenakan waktu pagi hari jam 7 pagi mereka telah cuci dan dibilas lalu ditebar di parak (lahan kayu penjemuran di atas laut), ketika jam 9 pagi datang hujan, sehingga hanya terjemur 2 jam dan ternyata pada saat itu Belitung sedang musim dimana cuaca kurang bersahabat selama satu bulanan penuh. Sedangkan ikan yang baru sebentar di jemur itu kan masih lembab dan panas, otomatis ikan tersebut ditutup pakai plastik dan dibiarkan selama sehari-hari untuk menunggu cuaca panas, akhirnya tumbuh bakteri yang menghancurkan daging ikan tersebut seperti timbul ulat, setelah ada ulat kan tidak bisa dijual, solusinya buang.” (Terappe, 2019)

Dari kerugian produksi yang mereka alami, bila dikonversikan ke nilai rupiah kurang lebih bisa sebesar 1 miliar dan tentunya ini jumlah yang sangat besar untuk hasil produksi dalam satu minggu. Semenjak kejadian tersebut masyarakat pesisir tidak berani memproduksi dengan jumlah besar lagi dikarenakan curah hujan yang sulit diprediksi akan merusak produksi mereka kembali. Fenomena seperti ini juga terjadi di desa-desa pesisir lainnya akibatnya produksi ikan asin dan olahan lainnya di Kecamatan Sijuk mengalami penurunan dan tidak stabil (Terappe, 2019).

Selain itu pengeringan dengan cara tradisional sebenarnya rawan akan mikrobiologi (*E coli*, *Salmonella sp.*, *Vibrio sp.*) dan kimia (Histamin) akibat kontaminasi Fisik (pasir, debu, tanah) sehingga kualitas produk ikan asin yang dihasilkan akan mengalami penurunan, padahal hasil tangkapan nelayan Sijuk sangat banyak sekali jadi. Masalah lainnya yaitu permintaan akan produk olahan perikanan sangat tinggi tetapi kapasitas masyarakat dalam mengolah masih rendah atau terbatas. Jumlah produksi akan hasil olahan perikanan itu sendiri rata-rata 20 ton/bulan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar daerah (KMB, 2017).

Oleh karena itu keadaan tersebut sangat merugikan dan membuat masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk berpotensi untuk terjebak ke dalam *devil circle*, yaitu produksi rendah, daya beli turun dan pendapatan tidak stabil akibatnya jurang kemiskinan sangat dekat dengan mereka. Tentunya masalah keamanan ekonomi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Sehingga dibutuhkan inovasi berupa teknologi tepat guna untuk membantu mereka dalam siklus ini dan membantu produksi mereka dalam mengeringkan olahan perikanan secara cepat agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan penghasilan produsen bisa stabil bahkan meningkat.

### **C. Kerjasama Kedubes Jepang dan Karya Muda Belitung**

Dengan adanya isu keamanan ekonomi yang menimpa masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk, sebuah lembaga non profit lokal bernama perkumpulan Karya Muda Belitung (KMB) berinisiatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan skema bantuan hibah untuk akar rumput yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia setiap tahunnya. KMB adalah sebuah perkumpulan yang berisikan anak-anak muda potensial dengan kepedulian tinggi untuk mengabdikan terhadap daerah. Aktivitas yang dilakukan oleh KMB dapat dikategorikan dalam “Development NGO” karena usahanya dalam mendorong kedubes Jepang untuk mendanai rancangan proyek yang mereka ajukan melalui skema bantuan hibah *grassroots*. KMB melakukan pembangunan secara fisik maupun non fisik untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat pesisir dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi olahan ikan mereka sehingga ada alternatif lain untuk memproduksi disamping bergantung pada sinar matahari karena jika musim hujan datang secara tiba-tiba mereka tidak bisa memproduksi bahkan produk olahan bisa rusak akibat lambat kering..

Ada tiga alasan yang membuat Karya Muda Belitung mengambil tawaran skema bantuan hibah untuk proyek akar

rumput / *grant assistance for grassroots human security project* (GGP) yang diberikan oleh pemerintah Jepang. *Pertama*, menurut Kementerian Dalam Negeri, bantuan hibah ini sudah sering diterima oleh Indonesia dalam mengatasi masalah di tingkat akar rumput sehingga tidak ada bentuk kepentingan yang sangat mengikat ketika bantuan ini dihibahkan kepada penerima artinya bantuan ini sudah dijamin legalitas dan kepercayaannya oleh pemerintah Indonesia. *Kedua*, mengingat program ini selalu ada dan sering diberikan setiap tahunnya, jadi ini cukup bagus untuk dijadikan suatu model pembelajaran bagi Karya Muda Belitung sebagai lembaga non profit yang relatif masih baru berdirinya, sehingga mereka ingin membuat suatu gerakan yang bisa berdampak besar. *Ketiga*, nilai dana yang di hibahkan oleh pemerintah Jepang dalam proyek ini cukup besar, jadi dananya besar sekali hingga lebih dari lima ratus juta bahkan lebih dari satu miliar. Selain itu proses *apply* proposal proyek nya juga sangat transparan sehingga tidak ada bentuk yang lain serta dijalankan secara professional<sup>3</sup> (Suryandaru, 2018).

Langkah pertama yang mereka lakukan terlebih dahulu yaitu penelitian dan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa sasaran yang merupakan calon penerima bantuan. Setelah itu Karya Muda Belitung berkoordinasi dengan aparat desa, pemerintah kecamatan Sijuk dan pemerintah daerah Belitung agar proyek yang akan mereka ajukan bisa tergambarkan dan mendapat persetujuan oleh para stake holder setempat. Setelah itu barulah Karya Muda Belitung mengirimkan formulir aplikasi atau proposal pengajuan proyek GGP kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia pada tahun 2016 (Suryandaru, 2018).

Ketika proposal proyek yang diajukan oleh Karya Muda Belitung diserahkan kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, proposal tersebut harus bersaing dengan ribuan

---

<sup>3</sup> Suryandaru, Ketua Perkumpulan Karya Muda Belitung, *Wawancara*, Tanjung Pandan, 22 Desember 2018



proposal proyek dari berbagai daerah yang sama-sama mempunyai proyek rancangan untuk minta didanai. Kemudian pada tahun anggaran 2017 pemerintah Jepang, proyek yang diajukan oleh Karya Muda Belitung dinyatakan lolos untuk tahap seleksi proposal. Menurut perwakilan Kedubes Jepang yang datang ke Belitung pada 1 Oktober 2018 dalam acara serah terima bantuan hibah menjelaskan bahwa proposal proyek yang diajukan oleh KMB memiliki dampak keberlanjutan yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk dan selain itu *track record* yang dimiliki oleh Karya Muda Belitung sebagai lembaga penerima hibah juga sangat baik<sup>4</sup> (Yoshida & Onue, 2018).

Selanjutnya pada tahun 2017 sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia mengirimkan perwakilannya, Tomoya Seki untuk melakukan kunjungan lapangan ke lokasi yang menjadi proyek sasaran di Kecamatan Sijuk. Perwakilan dari Kedubes Jepang datang dan berkunjung langsung ke desa-desa yang menjadi sasaran proyek dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dan kelayakan seperti yang dituliskan dalam proposal pengajuan proyek sebelumnya. Selain melihat kondisi dilapangan, perwakilan tersebut mendatangi para nelayan, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta stakeholder setempat (kepala desa, sekretaris camat Sijuk dan Bupati Belitung) untuk memastikan proyek tersebut benar-benar layak mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah Jepang sehingga apa yang ditulis oleh Karya Muda Belitung dalam proposal bukanlah rekayasa belaka. Jadi pemerintah Jepang dalam memberikan bantuannya untuk proyek akar rumput sangat detail sekali (Suryandaru, 2018).

Ketika perwakilan Kedubes Jepang mengumpulkan data dan fakta di lapangan secara detail, mereka menemukan potensi yang sangat besar di Kecamatan Sijuk. Disamping potensi perikanan sangat melimpah, potensi lain yang dimiliki setiap

---

<sup>4</sup> Kazuho Yoshida dan Yoko Onue, perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, *Wawancara*, Tanjung Pandan, 2 Oktober 2018

desa sasaran cukup bervariasi baik untuk produk perikanan maupun non perikanan yang cara produksinya juga sama-sama dikeringkan. Jadi konsep awal dalam proposal GGP yang diajukan oleh Karya Muda Belitung mengalami penambahan dari Kedubes Jepang sehingga dana yang diberikan melebihi rancangan awal dengan tujuan untuk kebermanfaatannya yang lebih besar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Karya Muda Belitung kepada peneliti yang menyatakan bahwa:

“Kita awalnya mengajukan dana sekitar Rp. 695.400.000,- pada tahun 2016, namun pada saat perwakilan Kedubes site visit ke lapangan pada tahun 2017 yang awalnya kita ngajuin dikit, tiba-tiba ditambihin mereka dananya karena proyek ini sangat menarik katanya. Tapi proyek ini kalau bisa tidak hanya untuk ikan asin mengingat potensi di Sijuk sangat banyak. Akhirnya konsep awal di proposal sedikit kita rombak dengan dasar keputusan dari Kedubes Jepang setelah visit lapangan karena potensi di setiap desa sasaran bermacam-macam ada yang produk olahan kering kerupuk, kemplang, terasi dan lain-lain bahkan non perikanan sekalipun juga bisa seperti produk olahan dari hasil pertanian dan perkebunan yang cara produksinya dikeringkan. Sehingga bantuan mesin yang sudah diberikan bisa memiliki manfaat yang lebih banyak.” (Suryandaru, 2018)

Akhirnya pada April 2018, untuk tahun anggaran 2017 (tahun anggaran Jepang di mulai pada bulan April hingga akhir Maret di tahun berikutnya) proyek yang diajukan oleh Karya Muda Belitung mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan Jepang. Hal tersebut dilakukan dengan penandatanganan Nota Kerjasama antara Kedutaan Besar Jepang oleh Duta Besar Jepang, Mr. Masafumi Ishii dengan Karya Muda Belitung yang diwakili oleh Ketua Umum, Suryandaru yang bertempat di kantor Kedutaan Besar Jepang Jakarta. Pada saat itu ada 7 proyek bantuan hibah akar rumput untuk keamanan manusia yang di pilih oleh Pemerintah Jepang untuk tahun anggaran 2017 mereka termasuk proyek di Belitung salah satunya dengan nama proyek ***“The Project for Supporting Fishermen in Belitung Island, Bangka Belitung***

**Province”**. Tentunya hal ini merupakan sejarah baru bagi provinsi Kepulauan Bangka-Belitung karena ini adalah GGP pertama di provinsi tersebut (Suhendar, 2018).

Menurut Karya Muda Belitung, ada dua faktor yang membuat mereka ingin bekerjasama dengan Kedubes Jepang untuk terlibat dalam mengatasi permasalahan kemandirian ekonomi yang ada di Kecamatan Sijuk. Pertama, Karya Muda Belitung memang sebuah perkumpulan yang beranggotakan anak-anak muda potensial dengan kepedulian sosial tinggi serta visi dan misi yang besar untuk mengabdikan terhadap daerah. Kedua, proyek ini juga didukung oleh para stake holder, seperti pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Daerah/Desa dan segala macam lembaga-lembaga terkait sehingga semuanya dilibatkan agar terlihat transparansinya (Suryandaru, 2018).

Sedangkan menurut pemerintah Jepang, ada dua faktor juga yang membuat proyek dari Karya Muda Belitung bisa lolos dari seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Pertama, proyek yang diajukan sangat menarik karena berada di luar pulau Jawa. Kedua, karena pembangunan di Indonesia selama ini hanya terpusat di pulau Jawa yang notabenehnya sudah cukup besar sehingga diluar pulau Jawa masih banyak yang pembangunannya masih minim dan masyarakatnya hidup dalam kemiskinan, selain itu ekonomi di daerah-daerah luar Jawa juga masih belum stabil. Oleh karena itulah pemerintah Jepang memprioritaskan daerah-daerah diluar Jawa termasuk Belitung untuk disentuh pembangunannya melalui bantuan hibah akar rumput (Yoshida & Onue, 2018)

Selain itu ada yang unik atau pembeda pada proyek di Belitung dibanding 6 proyek lainnya yang dipilih oleh Kedubes Jepang. *Pertama*, dari semua proyek hibah tersebut yang satu-satunya berkategori maritim hanya ada di Belitung, kebanyakan proyek lainnya adalah dibidang Pendidikan seperti perbaikan dan pembangunan gedung sekolah serta fasilitasnya dimana itu sudah sangat umum sekali. *Kedua*, pemerintah Jepang memberikan catatan bagus kepada proyek dari Karya Muda

Belitung karena tidak hanya memberikan hibah mesin namun juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi atau pemberdayaan masyarakat sehingga proyek ini dapat memberikan multiplayer effect bagi masyarakat. *Ketiga*, yang melaksanakan proyek ini adalah anak-anak muda potensial dengan visi dan misi pengabdian terhadap daerah yang dibawah naungan Perkumpulan Karya Muda Belitung sedangkan penerima hibah lainnya adalah yayasan, pesantren dan ormas keagamaan (Suryandaru, 2018).

#### D. Implementasi Bantuan

Tabel 4.2 Kerjasama antara Karya Muda Belitung dengan Kedubes Jepang di Indonesia dalam skema GGP



Sumber: (Penulis mengumpulkan dari beberapa sumber yang ada)

##### 1. Pengadaan asset material

Setelah kontrak kerjasama ditanda tangani oleh Kedubes Jepang dan Karya Muda Belitung, barulah dilakukan serah terima bantuan hibah berupa dana sebesar Rp 717,000,000,- (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) kepada Karya Muda Belitung untuk pengadaan mesin pengering makanan (Food Drying Machine) bagi desa-desa yang menjadi sasaran, namun kerjasamanya tidak sampai disitu, setelah pemberian dana, Kedubes Jepang akan terus mengawasi pelaksanaan proyek di Belitung agar sesuai target dan koridor aturan yang berlaku dalam kontrak kerjasama (MoU). Hal ini sesuai dengan apa

yang disampaikan oleh perwakilan Kedubes Jepang kepada penulis bahwa:

“Sesuai dengan prosedur yang sudah tertera, kami menerima proposal pengajuan bantuan dari KMB setelah itu kami menyetujui proposal tersebut, lalu kami melakukan kunjungan lapang terlebih dahulu ke Belitung serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, setelah itu barulah kontrak kerjasama antara Kedubes Jepang dan KMB dilakukan dengan pemberian bantuan dana kepada KMB untuk pengadaan mesin pengering (Food Drying Machine) untuk desa-desa yang dituju, namun kerjasamanya tidak sampai disitu, setelah pemberian dana kami akan terus mengawasi pelaksanaan proyek ini di Belitung agar sesuai target dalam kontrak kerjasama.” (Yoshida & Onue, 2018)

Perlu diketahui bahwa dari total 10 desa yang ada di Kecamatan Sijuk hanya 6 desa saja yang menjadi sasaran proyek (Batu Itam, Terong, Tanjung Binga, Keciput, Sijuk dan Sungai Padang) dikarenakan secara geografis desa-desa ini berada di tepi laut yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut baik pantai maupun tebing karangnya dan potensi hasil lautnya juga melimpah sehingga proyek hibah ini sangat sesuai diterapkan pada desa-desa tersebut dan desa Tanjung Binga juga menjadi prioritas dalam proyek ini (Suryandaru, 2018). Selain itu, 80% dari total 1.700 keluarga yang menetap di desa ini bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga disebut sebagai desa nelayan. Bahkan desa ini juga dikenal sebagai salah satu sentra ikan asin terbesar di Indonesia dan kualitas ikan asin mereka juga telah sampai ke mancanegara melalui ekspor dari pengepul di Jakarta (Kompas, 2018). Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Karya Muda Belitung (Suryandaru, 2018) bahwa:

“Desa sasaran yang dipilih dalam proyek ini adalah desa yang berada di wilayah pesisir karena memiliki potensi ekonomi perikanan yang cukup besar.”

Sesuai dengan isi kontrak kerjasama yang sudah ditanda tangani, bantuan dana sebesar Rp 717,000,000,- akan digunakan untuk penyediaan *asset material* berupa 10 mesin pengering berkapasitas besar. Namun dana tersebut hanya dipergunakan untuk penyediaan dan penyaluran mesin pengering saja sementara biaya perjalanan Karya Muda Belitung dalam mengimplementasikan proyek di setiap desa harus ditanggung oleh pihak Karya Muda Belitung itu sendiri. Kedubes Jepang menawarkan tiga vendor mesin kepada Karya Muda Belitung untuk dinilai dan dipilih berdasarkan kualitas, harga dan spesifikasinya. Lalu Karya Muda Belitung memilih untuk melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk bisa membuat dan menilai kelayakan materi akhirnya dibuatlah mesin pengering yang bertenaga listrik dan gas (Suryandaru, 2018).

Setelah itu, mesin pengering yang sudah jadi dikirim ke Belitung sesuai tanggal dan waktu pelaksanaan. Dalam hal ini Kedubes Jepang yang mengatur semuanya sehingga dana sebesar Rp 717,000,000,- digunakan untuk penyediaan asset material berupa 10 buah mesin pengering makanan berkapasitas besar, jadi Karya Muda Belitung hanya memantau pembuatan mesin dan menerima mesin saja ketika sudah jadi untuk disalurkan ke desa-desa yang menjadi sasaran. Kemudian mesin pengering yang sudah dikirim ke Belitung akan disalurkan ke tempat-tempat strategis yang dekat dengan kelompok masyarakat pengguna mesin pengering pada 6 desa sasaran. Mesin pengering yang sudah diberikan nantinya akan menjadi asset bagi setiap desa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau kelompok masyarakat pemanfaat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk membantu mengoperasikannya (Suryandaru, 2018).

Cara kerja mesin ini sangat sederhana yaitu produk olahan yang masih mentah cukup dimasukkan ke dalam mesin sesuai dengan kebutuhan waktu pengeringan. Ada 2 kelebihan dari penggunaan mesin pengering ini dibandingkan menggunakan panas sinar matahari. *Pertama* waktu yang dibutuhkan untuk

mengeringkan produk olahan akan lebih cepat yaitu 3-4 jam saja sedangkan cara tradisional dengan memanfaatkan panas matahari membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari, itu pun jika tidak terkendala hujan mengingat curah hujan di pulau Belitung cukup tinggi, sehingga metode pengeringan menggunakan mesin pengering bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan kuantitas produk. *Kedua*, produk yang dikeringkan dalam mesin pengering yang tertutup akan lebih bersih karena resiko terkena kontaminasi fisik (pasir, debu dan air hujan) akan lebih terminimalisir sehingga kualitas produk akan lebih bagus.

## 2. Pemberdayaan

Setelah mesin disalurkan ke tempat-tempat strategis yang ada pada 6 desa sasaran, Karya Muda Belitung mulai melaksanakan lanjutan dari skema GGP dari pemerintah Jepang yang mengharuskan Karya Muda Belitung untuk membuat program pemberdayaan bagi masyarakat pesisir berupa kelas aplikatif di lingkungan produksi agar bantuan yang diberikan bisa berjalan efektif, berkelanjutan serta memberikan edukasi kepada mereka dalam merancang, mengerjakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan yang sudah diberikan.

Menurut pernyataan pengawas proyek dari KMB, metode pemberdayaan yang dilakukan oleh mereka dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

*“Pertama* yang telah kita lakukan adalah pendekatan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat tersebut adalah kepala desa yang menguasai satu wilayah desa. *kedua* itu adalah kita membentuk sebuah pola dari KMB sendiri pola ini kemarin salah satu bentuk polanya adalah KMB itu membentuk penanggung jawab di setiap masing-masing desa yang bertugas untuk memfollow up penggunaan mesin. *Ketiga*, sosialisasi fungsi dan manfaat langsung kepada kelompok masyarakat yang berpotensi menggunakan mesin untuk belajar bagaimana caranya mengoperasikannya

dengan benar agar mendapatkan keuntungan yang lebih optimum.”<sup>5</sup> (Arief, 2019)

Dari pernyataan diatas, dapat diuraikan secara rinci tentang tahapan implementasi bantuan hibah yang dilakukan oleh KMB kepada masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk dalam rangka memberdayakan ekonomi mereka, yaitu:

## **2.1 Interaksi dengan pemerintah Desa setempat**

Sebelum mengimplementasikan proyek kepada masyarakat desa, KMB melakukan pendekatan kepada para kepala desa yang desanya menjadi sasaran proyek terlebih dahulu mengingat peran mereka yang cukup strategis sebagai pemangku kebijakan agar bisa diajak bekerja sama dalam membantu KMB mengimplementasikan proyek kepada masyarakat. Selain itu, interaksi dengan kepala desa dilakukan guna membangun sebuah koridor kerja sama pemakain mesin di tiap desa yang dituangkan kedalam bentuk nota kesepahaman kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU). Dalam MoU tersebut intinya adalah Karya Muda Belitung yang mengatur semua skema pemberdayaan masyarakat dan sistem operasionalnya sehingga dapat menciptakan suatu skema pemberdayaan masyarakat yang sifatnya berkelanjutan atau jangan sampai bantuan hibah yang sudah diberikan mengalami *stuck*, intinya bantuan hibah tersebut bisa terus dipakai untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dalam mengatasi masalah keamanan ekonomi mereka.

Hal ini dilakukan karena kepala desa yang paling tahu dengan kondisi yang ada didesa sehingga ketika pemerintah desa setempat sudah terbuka dan siap untuk bekerja sama dengan KMB maka apa yang ingin di sampaikan kepada masyarakat terkait proyek akan sangat mudah dipahami. Kepala desa memberikan titik lokasi yang strategis untuk menempatkan mesin pengering dan melakukan penunjukan kelompok

---

<sup>5</sup> Arief Kurnia, Pengawas Proyek dari Karya Muda Belitung, *Wawancara*, Tanjung Pandan, 13 Januari 2018



masyarakat mana saja yang bisa mengelola mesin ini dengan baik tujuannya agar implementasi bantuan bisa lebih efektif dan penggunaan sumber daya juga lebih efisien, adapun kelompok-kelompok masyarakat tersebut adalah Kelompok nelayan dan kelompok masyarakat pemanfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## **2.2 Pembentukan pola**

KMB melakukan sosialisasi langsung kepada kelompok masyarakat yang sudah ditunjuk mengenai fungsi dan manfaat mesin pengering bagi kegiatan industri ikan asin dan produk olahan lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang awalnya mengalami ketidakstabilan ekonomi akibat melakukan industri dengan cara-cara tradisional kini bisa mendapatkan alternatif lain bagi kemajuan industri mereka. Dalam tahap awal implementasi program pemberdayaan, KMB membentuk pola pelatihan kepada masyarakat terkait tata cara pengelolaan dan perawatan mesin.

Pola yang dibentuk oleh KMB yaitu dengan membentuk dua struktur penanggung jawab untuk setiap desa. *Pertama* penanggung jawab dari KMB untuk memberikan kelas aplikatif kepada setiap kelompok masyarakat pemanfaat mesin pengering di 6 desa sasaran. *Kedua*, penanggung jawab dari masyarakat desa untuk mengelola dan bertanggungjawab atas keberlangsungan bantuan yang sudah diberikan. Tujuan pembentukan ini dilakukan agar penanggung jawab dari KMB dapat berkoordinasi dengan penanggung jawab dari desa untuk memastikan bahwa bantuan yang telah diberikan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Jadi, sistem pengelolaan bantuan mesin ini sebenarnya dilakukan berdasarkan asas gotong royong didalam masyarakat.

## **2.3 Eksekusi rencana awal**

Ada tiga strategi yang digunakan KMB untuk mengeksekusi rencana awal dalam memberdayakan masyarakat akar rumput

(masyarakat miskin) di 6 desa sasaran melalui pemanfaatan mesin pengering, yaitu:

2.3.1 Pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat pesisir yang memiliki industri ikan asin dan olahan lainnya di enam desa sasaran.

Dalam hal ini Karya Muda Belitung bekerjasama dengan pemerintah desa setempat, secara teknis kegiatan ini dilakukan oleh tim penanggung jawab desa dari KMB mengundang setiap perwakilan kelompok usaha untuk diberikan sosialisasi dan workshop mengenai bantuan hibah mesin pengering yang diadakan selama tiga bulan setelah bantuan datang. Sosialisasi dan workshop tersebut meliputi :

- a. fungsi dan manfaat mesin pengering bagi kegiatan industri ikan asin dan olahan lainnya agar masyarakat tahu cara meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk terbebas dari masalah keamanan ekonomi
- b. tata cara pengoperasian, pengelolaan dan perawatan bantuan mesin dengan baik dan benar
- c. jenis produk yang cocok dan tata cara mengolahnya dalam penggunaan mesin pengering

2.3.2 Pembuatan mekanisme pemakaian yang mengandalkan asas gotong royong dalam masyarakat meliputi:

- a. Sistem antrian pemanfaatan mesin
- b. Penerapan peraturan mengenai sumber pemasukan untuk tiap unit mesin pengering yang diperbolehkan yaitu iuran masyarakat yang sesuai dengan kesepakatan bersama, dana sukarela/tips bila mendapatkan keuntungan besar dari pejualan produk dan pihak luar yang ingin berdonasi.
- c. Sumber pemasukan untuk setiap mesin ini dibuat agar setiap asset memiliki kas cadangan untuk

biaya operasional seperti pembayaran listrik dan pembelian gas tabung serta biaya perbaikan mesin apabila terjadi kerusakan terhadap mesin pengering sehingga bantuan yang sudah diberikan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk kegiatan usaha yang lebih produktif.

- 2.3.3 Pembinaan kelompok usaha pemanfaat bantuan mesin meliputi:
- a. akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi,
  - b. partisipatif dalam kepemimpinan
  - c. transparan dalam pengelolaan keuangan
  - d. pembinaan wirausaha yang baik dan cara mendapat pasar yang luas
  - e. mengedukasi produsen agar dapat terbebas dari masalah ketidakstabilan dan ketidakterjaminan pendapatan yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka sebagai masyarakat pesisir

## **2.4 Tanggung jawab KMB**

Menurut pengawas proyek dari KMB menyatakan bahwa:

“...jika ada kerusakan pada mesin kita mendatangkan tim teknisi untuk memperbaiki mesin dimana tim teknisi ini ketika mereka memperbaiki mesin itu, masyarakat kita ikut sertakan agar masyarakat memahami cara kerja dari mesin ini bukan secara operasional saja tapi melainkan apabila ada kesalahan di sini yang di perbaikinya apa.” (Arief, 2019)

Artinya selama kontrak kerjasama dengan desa masih berlangsung, KMB terus bertanggung jawab untuk memperbaiki mesin jika terjadi kerusakan secara teknis. KMB mendatangkan teknisi lokal maupun dari LIPI untuk memperbaiki mesin yang mengalami kerusakan. Selain itu masyarakat juga di ikut sertakan agar tidak hanya memahami cara kerja mesin secara operasional saja melainkan dapat memperbaikinya bila terjadi kerusakan sehingga melalui skema

pemberdayaan seperti ini masyarakat bisa mandiri dalam mengelola bantuan yang sudah diberikan.

KMB mendatangkan teknisi profesional memperbaiki beberapa unit mesin pengering yang pernah mengalami kerusakan dengan mengikutsertakan kelompok masyarakat agar paham bagaimana merawat mesin dengan baik. Dalam hal ini penanggung jawab mesin dari setiap desa terus berkoordinasi dengan penanggung jawab dari KMB agar menghasilkan komunikasi yang baik dalam mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat desa. Sehingga ketika kontrak kerjasama antara KMB dengan desa telah berakhir, masyarakat bisa mengelola bantuan secara mandiri (Terappe, 2019).

Berdasarkan konsep pemberdayaan menurut Sumodiningrat dalam (Bhinadi, 2017), intinya tahap implementasi *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP) yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu : *Pertama*, dengan adanya proyek bantuan hibah dari pemerintah Jepang untuk masyarakat pesisir di Belitung, Kedubes Jepang di Indonesia bekerjasama dengan Karya Muda Belitung untuk membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan bantuan mesin pengering (food drying machine) untuk memproduksi ikan asin dan olahan lainnya. *Kedua*, program tersebut mengikutsertakan masyarakat melalui pendampingan, perencanaan dan pembentukan kelas aplikatif di lingkungan produksi agar bantuan yang diberikan bisa efektif serta memberikan kemampuan dan pengalaman mereka dalam merancang, mengerjakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan yang sudah diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan diri dan ekonomi. *Ketiga*, program yang dibuat akan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat agar pelaksanaannya bisa lebih efektif dan penggunaan sumber daya juga lebih efisien, adapun kelompok-kelompok masyarakat tersebut adalah Kelompok nelayan dan kelompok masyarakat pemanfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tujuan akhir dari implementasi GGP ini adalah agar masyarakat pesisir Kecamatan Sijuk mempunyai alternatif yang lebih modern dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas industri produk olahan kering secara efektif dan efisien sehingga dapat keluar dari masalah keamanan ekonomi seperti ketidakstabilan dan ketidak terjaminan pendapatan yang mereka terima dari hasil pemasaran. Sehingga melalui pemanfaatan bantuan yang sudah diberikan kedutaan besar Jepang di Indonesia kepada Karya Muda Belitung untuk mengimplementasikannya, maka masyarakat mendapatkan menjadi tereduksi dan terbantu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Bahkan secara tidak langsung juga dapat memberikan citra positif bagi Jepang sebagai pemberi bantuan di tingkat akar rumput seperti Kecamatan Sijuk yang menjadi sasarannya.

### **E. Masalah dan Tantangan**

Menurut (Arief, 2019) ada beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Karya Muda Belitung sebagai pelaksanaan proyek bantuan di daerah sasaran sehingga menjadi faktor yang memperlambat proses pelaksanaan, antara lain yaitu:

#### **1. Kualitas sumber daya manusia di desa yang masih rendah**

Pelu dikethaui bahwa kecamatan Sijuk merupakan daerah pedesaan dan daerah perkotaan di Kabupaten Belitung hanya terletak di Tanjung pandan, sedangkan jarak antara Tanjung Pandan - Sijuk yaitu sekitar 34,4 KM atau 49 menit bila menggunakan transportasi bis. Lokasi daerah sasaran yang terpencil dan akses transportasi yang cukup sulit berakibat pada kurangnya informasi mengenai perkembangan teknologi di daerah sasaran tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pola pikir masyarakat yang masih tradisional sehingga beberapa masyarakat cenderung masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi pengeringan produk dengan cara lama tidak dapat diubah secara mutlak karena tradisi tersebut bagi mereka merupakan cara yang paling mudah untuk memproduksi ikan

asin dan olahan kering lainnya. Selain itu prasangka buruk terhadap hal baru juga mengganggu proses perubahan sosial. Misalnya ada semacam ketakutan dari sekelompok masyarakat tertentu yang kurang menerima cara produksi yang modern, lalu sekelompok orang tadi berusaha mempengaruhi kelompok yang lain. Tentu sikap konservatif seperti ini membawa mentalitas buruk dalam sebuah kemajuan, karena itu sikap tersebut harus dihindari dan perlu Teknik pengendalian sosial yang tepat.

GGP dari pemerintah Jepang ini merupakan yang pertama kali di Provinsi Bangka-Belitung dengan proyek untuk industri kecil pedesaan berbasis teknologi. Oleh karena itu di butuhkan sebuah pemahaman dasar kepada masyarakat desa yang kebanyakan masih memiliki pola pikir tradisional. Sehingga ketika proyek hibah akar rumput masuk ke dalam masyarakat KMB harus menggunakan teknik sosialisasi yang tepat untuk memberikan pemahaman yang sangat dasar mengenai fungsi dan manfaat bantuan mesin untuk mengoptimalkan proses industri mereka. Jadi intinya ini baerkaitan erat dengan masalah kualitas sumber daya manusia yang masih rendah sehingga KMB harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa bantuan mesin ini benar-benar dibutuhkan sebab cara penyampaian lebih penting (how) dibanding apa yang ingin disampaikan (what). Jadi, walaupun bantuan hibah mesin yang diberikan sangat bagus namun jika upaya penyampaian gagal dalam meyakinkan masyarakat secara benar maka masyarakat akan menolak karena berpotensi menimbulkan kesan buruk bagi masyarakat.

## **2. Jarak yang jauh antara produksi mesin dengan daerah sasaran**

Mengingat jarak antara lokasi proyek yang ada di pulau Belitung dengan LIPI sebagai vendor mesin yang ada di tanggerang sangat jauh dan terpisah oleh laut sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk pengiriman mesin dan mengalami keterlambatan satu bulan dari rencana awal pelaksanaan proyek. Jadi, bila terdapat kerusakan pada mesin,

perlu waktu yang lama untuk mendatangkan teknisi dari LIPI ke Belitung maupun mengirim mesin kembali sebagai jaminan garansi. Jadi masalah jarak antara LIPI dan lokasi proyek yang jauh mengakibatkan koordinasi untuk memperbaiki kerusakan cukup lama.

### **3. Lingkup penggunaan Dana hibah yang Terbatas**

Perlu diketahui bahwa dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Jepang hanya dipergunakan untuk pembuatan mesin pengering dan pengirimannya ke Belitung sementara biaya perjalanan KMB dalam mengimplementasikan proyek di setiap desa sasaran harus ditanggung oleh pihak Karya Muda Belitung itu sendiri. Sehingga KMB mengalami sedikit masalah finansial untuk melanjutkan proyek setelah bantuan mesin sampai ke desa-desa sasaran. Beruntung ada beberapa sponsor lain yang membantu biaya perjalanan KMB untuk bisa mengimplementasikan proyek di setiap desa sasaran.

### **F. Dampak**

Dengan adanya kerjasama ekonomi yang telah dilakukan Karya Muda Belitung dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia akan memunculkan dampak bagi masyarakat pesisir yang mempunyai usaha ikan asin dan produk olahan lainnya. Secara umum yang akan merasakan dampak dari adanya kolaborasi ini yaitu para pelaku usaha ikan asin dan produk lainnya. Proyek yang dibangun oleh Kedubes Jepang dan Karya Muda Belitung di Kecamatan Sijuk merupakan program jangka panjang yang memerlukan pengawasan dan tindak lanjut secara berkelanjutan agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan.

Pemerintah Jepang lebih suka memberikan GGP di daerah yang jauh dari pusat pembangunan seperti pulau Jawa, karena menurut mereka daerah luar pulau Jawa kurang tersentuh pembangunan serta rawan terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (Yoshida & Onue, 2018). Oleh karena itu sasaran utama Karya Muda Belitung dalam skema GGP dari

Kedubes Jepang yaitu pelaku usaha produk olahan kering yang mengalami ketidakstabilan pendapatan akibat kualitas dan kuantitas produk yang masih rendah sehingga membuat mereka mudah untuk terkena masalah keamanan ekonomi.

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan ada beberapa prinsip yang digunakan oleh KMB untuk mengimplementasikan proyek di daerah sasaran, yaitu:

1. *Acceptable*, mudah diterima dan dimaksimalkan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola.
2. *Accountable*, mampu dikelola oleh masyarakat secara transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
3. *Profitable*, mampu memberikan pendapatan yang memadai sehingga secara tidak langsung masyarakat menjadi terdidik untuk mengelola bantuan mesin pengering secara ekonomis
4. *Sustainable* , mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi sektor industri masyarakat pesisir sehingga dapat menstabilkan perekonomian mereka
5. *Replicable*, mampu memberikan hasil yang di dapat untuk dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas

Sebenarnya hasil yang diperoleh dari setiap desa sangat beragam sehingga ukuran berhasil proyek tidak bisa difokuskan pada satu jenis produk saja karena potensi sumber daya yang dimilikinya juga sangat beragam. *Pertama* Desa Batu Itam, selain memiliki hasil laut yang melimpah namun potensi terbesarnya adalah hasil pertanian, oleh sebab itu pemanfaatan mesin pengering dikelola oleh petani dan kelompok UMKM untuk sektor pertanian dalam menghasilkan produk olahan berupa buah kering dan lada putih. *Kedua* Desa Terong dan Desa Keciput, penggunaan mesin lebih kepada produk dari hasil laut seperti kemplang dan sebagainya dimana pemanfaatan mesin banyak dipakai oleh kelompok UMKM. *Ketiga* Desa



Tanjung Binga, desa ini mendapatkan predikat sebagai salah satu sentra ikan asin terbesar di Indonesia sehingga pengguna mesin pengering di desa ini kebanyakan untuk produk ikan asin dan produk olahan lainnya yang di manfaatkan oleh nelayan ikan asin dan kelompok UMKM. *Keempat* Desa Sijuk dan Sungai Padang, potensi terbesar di kedua desa ini adalah terasi, tapi untuk Desa Sijuk bukan cuman terasi melainkan ada produk seperti mie kering dan lain-lain sebagainya, pemanfaat mesin di kedua desa ini adalah nelayan dan kelompok UMKM (Arief, 2019).

Menurut pengakuan pelaku UMKM di desa Tanjung Binga, testimoni mereka setelah menggunakan mesin pengering untuk mengolah produk, yaitu:

“pada saat musim hujan kan kita tidak bisa berproduksi namun dengan adanya mesin ini kita tetap bisa berproduksi walaupun musim hujan sehingga tidak terlalu berpengaruh seperti dulu lagi. Jadi intinya tidak terkendala cuaca lagi Karena sudah ada mesin pengering. Terutama jangan sampai terkontaminasi bakteri karena ketika kita memproduksi produk olahan yang harus diperhatikan adalah kehygienisannya. Kita tahu bahwa cara kerja mesin ini yaitu produk olahan dimasukkan kedalam mesin. Kemudian beberapa jam baru diambil sehingga tidak perlu proses pengeringan di area luar lagi gitu karena dia dalam satu tempat. Mudah-mudahan seperti ini yang bisa membantu masyarakat setempat. dan semoga dengan adanya bantuan ini bisa mengembangkan UMKM desa. Sehingga pemasarannya bisa luas bahkan sampai ke luar negeri. Jadi Ibu dan masyarakat lainnya yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini nantinya diharapkan mendapatkan pendapatan yang stabil bahkan meningkat<sup>6</sup>.”

Artinya pelaku usaha produk olahan kering sudah merasakan manfaat dari penggunaan bantuan mesin pengering ini bagi kegiatan usaha mereka. Hal ini pun ditambahkan oleh

---

<sup>6</sup> Nila, Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Tanjung Binga, *Wawanacara*, 3 Januari 2019

(Arief, 2019) selaku pengawas proyek dari KMB yang menyatakan bahwa ada tiga dampak nyata setelah Karya Muda Belitung melakukan kerjasama ekonomi dengan Kedubes Jepang melalui skema GGP, yaitu :

*Pertama*, para pelaku usaha memiliki alternatif lain untuk melakukan industri yang lebih modern tanpa terkendala cuaca yaitu mengeringkan produk menggunakan teknologi tepat guna berupa mesin pengering sehingga kegiatan produksi mereka bisa lebih efektif dan efisien. Tentunya cara seperti ini merupakan inovasi yang sangat futuristik di bidang industri ikan asin dan produk olahan lainnya mengingat kegiatan industri seperti ini biasanya dilakukan menggunakan cara tradisional yaitu dengan bergantung pada panas matahari saja itupun bila tidak terkendala musim hujan.

*Kedua*, dengan adanya hibah mesin pengering, kualitas produk dari hasil pengeringan menggunakan mesin jauh lebih bersih bila dibandingkan dengan pengeringan secara tradisional di area terbuka karena bisa meminimalisir kontaminasi fisik (pasir, debu dan tanah) yang berpotensi menimbulkan bakteri. Kemudian bila cuaca sedang tidak stabil biasanya akan menyebabkan pengeringan menjadi tertunda sehingga proses produksi tidak optimal dan oleh sebab itulah akan timbul bakteri yang bisa merusak produk. Selain itu, metode pengeringan menggunakan mesin pengering dapat mempercepat proses pengeringan yaitu sekitar 3-4 jam saja sedangkan metode pengeringan tradisional membutuhkan waktu produksi yang lama (2-3 hari) (Nila, 2019). Sehingga dengan percepatan proses produksi seperti ini, para pelaku usaha bisa menambah kuantitas produk dalam memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi. Dengan adanya bantuan hibah dari Jepang, para masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai produsen ikan asin dan olahan kering lainnya dapat melebihi 20 ton/bulan

*Ketiga*, ketika kualitas dan kuantitas produk mengalami peningkatan, maka nelayan ikan asin dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapatkan pemasukan yang

stabil dari hasil penjualan produk di pasar. Intinya mendapatkan akses mudah ke sumber ekonomi yang sangat potensial. Selain itu, mereka juga mendapatkan pendapatan yang layak dan tidak sama seperti kondisi sebelumnya sehingga terhindar dari masalah keamanan ekonomi yang bisa mengancam kesejahteraan mereka.